

FORMAT DATA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI LUWU TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	persen	100	100	5.277.003.466	4.972.639.866	94,23	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	100	3.787.306	2.590.500	68,40	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2.021.240	1.931.500	95,56	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	231.000	0	0,00	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	231.000	0	0,00	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	270.000	0	0,00	100

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	270.000	0	0,00	100
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	764.066	659.000	86,25	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	persen	100	100	4.684.179.993	4.399.038.399	93,912668	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	636	636	4.577.379.993	4.327.838.399	94,55	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	106.800.000	71.200.000	66,67	100
1.3	Administrasi Barang Milik Dari pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	persen	100	100	6.464.181	4.372.000	67,63	100
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	6.464.181	4.372.000	67,63	100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	100	255.743.238	246.102.730	96,23	100

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	3.106.200	3.104.800	99,95	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	4.176.000	4.175.950	100,00	100
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	9.088.176	9.087.000	99,99	100
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	7	7	8.400.000	6.600.000	78,57	100
1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	6	6	30.503.462	30.449.120	99,82	100
1.4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	8.454.400	8.450.000	99,95	100
1.4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	192.015.000	184.235.860	95,95	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	persen	100	100	266.233.000	260.061.847	97,68	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	24.000.000	24.000.000	100,00	100

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	63.998.000	57.836.847	90,37	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	5.735.000	5.725.000	99,83	100
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	172.500.000	172.500.000	100,00	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai ketentuan/kebutuhan	persen	100	100	60.595.748	60.474.390	99,80	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	15	56.071.311	55.958.390	99,80	100
1.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	4.524.437	4.516.000	99,81	100
2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan jenis pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan	persen	90	90	687.812.684	679.891.165	98,85	100

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang telah diberikan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi	persen	60	55	669.396.454	664.585.565	99,28	100
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	16	16	71.873.250	67.103.200	93,36	100
3.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	1	597.523.204	597.482.365	99,99	100
3.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang aktif	LPK	4	4	18.416.230	15.305.600	83,11	100
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja Swasta yang dibina	LPK	4	4	18.416.230	15.305.600	83,11	100
3	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	persen	7,41	20,97	55.803.622	48.945.100	87,71	100,00
4.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten	persen	100	100	34.632.930	30.284.100	87,44	100
4.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKD dan AKL	orang	30	845	34.632.930	30.284.100	87,44	100

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
4.2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pelindungan PMI di Daerah Kabupaten	Persen	30	30	21.170.692	18.661.000	88,15	100
4.2.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	3	30	21.170.692	18.661.000	88,15	100
4	Hubungan Industrial	persentase perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak	Persen	39,1	16,85	1.143.513.564	1.111.056.200	97,16	100
5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	perusahaan	100	86	24.912.147	16.195.900	65,01	90
5.1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1	24.912.147	16.195.900	65,01	90
5.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja	persen	100	100	1.118.601.417	1.094.860.300	97,88	100

No	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik
						(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	2	2	14.935.724	13.311.800	89,13	100
5.2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Tenaga Kerja	orang	12484	12234	1.103.665.693	1.081.548.500	98,00	100
5	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Ha	12	12	29.785.477	16.129.700	54,152901	100
6.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	lokasi	1	1	29.785.477	16.129.700	54,15	90
6.1.1	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	50	40	29.785.477	16.129.700	54,15	90
TOTAL ANGGARAN						7.193.918.813	6.828.662.031	94,92	99,91

Belopa, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi



Drs. HASBULLAH BIN MUSH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199703 1 034

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

A. Tenaga Kerja

No	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Sarana/fasilitas pelatihan (gedung workshop dan peralatan pelatihan) yang masih terbatas	Pelaksanaan pelatihan diatur dengan jadwal yang bergantian dengan mengoptimalkan sarana/fasilitas yang ada.
2	Sebagian besar pelaksanaan pelatihan BLK sangat tergantung dari pendanaan pusat sehingga pelatihan yang berbasis kearifan lokal/kewirausahaan relatif minim	Pelaksanaan pelatihan dengan pendanaan APBD dilaksanakan lebih berorientasi pada kearifan lokal/kewirausahaan yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan swasta atau komunitas di daerah
3	Kelembagaan Balai Latihan Kerja belum sepenuhnya kejuruannya terakreditasi sehingga daya dukung kualitas kelembagaan masih standar	Peningkatan kualitas kelembagaan dengan mendorong akreditasi BLK serta peningkatan kompetensi instruktur secara berkala agar pelatihan dapat berkembang sesuai dengan kondisi dunia kerja/usaha

Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan

B. Tenaga Kerja

No	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Terbatasnya SDM aparatur dalam melaksanakan pelayanan antar kerja	Peningkatan sumber daya aparatur (kuantitas dan kualitas) terkait pelaksanaan pelayanan antar kerja
2	Sarana/fasilitas pelayanan yang masih belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan antar kerja secara online	Pengembangan sarana/fasilitas pelayanan antar kerja online secara terintegrasi dan memadai
3	Belum adanya fasilitas pelayanan antar kerja bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan yang berlaku	Pengadaan fasilitas pelayanan antar kerja bagi penyandang disabilitas
4	Belum adanya media informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pencari kerja baik terkait pelayanan pencari kerja, informasi lowongan kerja, atau informasi kerja lainnya	Penyediaan media informasi yang dapat diakses oleh pencari kerja secara online
5	Belum adanya mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi pencari kerja yang telah ditempatkan sehingga besaran penyerapan tenaga kerja terdaftar relatif tidak jelas	Penyediaan mekanisme pelaporan dan pengaduan pelayanan antar kerja yang mudah dan cepat berbasis IT

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

C. Tenaga Kerja

No	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Sebagian besar pemberi kerja (perusahaan) masih belum memahami aturan-aturan ketenakerjaan yang berkaitan dengan peraturan perusahaan, hubungan kerja, jaminan kerja dan pengupahan yang sesuai standar upah	Sosialisasi terkait peraturan perusahaan, hubungan kerja, jaminan kerja dan pengupahan
2	Masih rendahnya pelaporan perusahaan terkait rencana tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja	Sosialisasi terkait rencana tenaga kerja (mikro/perusahaan), wajib lapor lowongan kerja dan melakukan monitoring secara berkala ke perusahaan serta menjalin komunikasi aktif dengan perusahaan terkait informasi dan penempatan kerja.

D. Bidang Transmigrasi

No	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1	Tidak adanya perencanaan kawasan transmigrasi sehingga memungkinkan untuk terjadi perubahan fungsi kawasan transmigrasi	Penetapan Kawasan transmigrasi dalam RTRW Daerah; Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi secara berkala
2	Tidak adanya peningkatan keterampilan dan produktivitas masyarakat transmigrasi	Pelaksanaan pelatihan pada masyarakat transmigrasi
3	Sebagian Kawasan transmigrasi belum memiliki legalitas yang sah sehingga tidak dikelola dengan baik	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengurusan legalitas lahan (sertifikat lahan) transmigrasi dan meninjau Kembali lokasi pemukiman Kawasan transmigrasi bersama aparatur setempat

Belopa, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi


Drs. HASBULLAH BIN MUSH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199703 1 034